

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian berarti anak-anak yang dengan kebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan anak-anak berkesulitan belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang mengalami kelainan dalam penglihatan, pendengaran, proses mental, memfungsikan sebagian anggota badan, tingkah laku anak yang mengalami tingkat kesulitan belajar berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan. berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Pengakuan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara, juga diperkuat dalam berbagai deklarasi internasional. Pada tahun 1948, Deklarasi Hak Asasi

Manusia mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (*basic human right*). Deklarasi jamtien ini diperkuat lagi dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* tahun 1994 yang secara lebih tegas menuntut agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bersifat *inklusif*, sehingga system pendidikan yang memisahkan individu dan komunitasnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kecenderungan dunia dalam memberikan perhatian terhadap hak-hak anak khususnya di bidang pendidikan terus bergulir. Dalam The World Education Forum (2000) di Dakar, ditegaskan kembali perlunya memberikan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang melayani semua anak termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus. Dalam kenyataannya sebagian dari anak berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berkesulitan belajar belum sepenuhnya mendapat perhatian secara maksimal. Orang tua dan masyarakat belum dapat berbuat banyak, karena semua proses pendidikan ditumpukan kepada guru dan jajaran pendidikan saja.

Seyogyanya, agar semua anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung di SLB. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah SLB adalah biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa/reguler. Selain itu SLB yang ada biasanya berlokasi di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, padahal anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di daerah yang sulit dijangkau. Kesulitan belajar (*Learning Disability*), terdiri dari kesulitan belajar umum seperti lamban belajar (*Slow Learner*), dan kesulitan belajar khusus

yaitu kesulitan belajar pada bidang pelajaran tertentu saja misalnya kesulitan membaca (*Disleksia*), kesulitan berhitung (*Diskalkulia*) dan kesulitan menulis (*Disgrafia*). Anak-anak ini, seperti anak-anak yang memerlukan layanan khusus, merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus yang mendapat layanan pendidikan yang tepat akan dapat dikembangkan potensinya secara optimal.

Sebagian dari anak yang memerlukan layanan khusus itu mungkin sekali selama ini belajar di sekolah biasa/reguler. Namun karena tidak ada pelayanan pendidikan khusus di sekolah reguler, maka anak-anak ini mempunyai potensi besar untuk mengulang kelas dan akhirnya putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dikembangkan manajemen pendidikan terpadu (inklusi) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus. Selama ini pendidikan terpadu baru diselenggarakan untuk anak berkebutuhan pendidikan khusus, namun belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Agar pengembangan pendidikan terpadu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen sekolah terpadu (inklusi) yang baik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber

daya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan *task commitment* (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal.

Manajemen sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar-mengajar (Depdiknas 2003: 1-2).

Digulirkannya reformasi dan kebersamaan era globalisasi kehidupan penuh persaingan, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya dibidang program pendidikan dasar di Indonesia, sehingga dapat memunculkan adanya fenomena baru di bidang pendidikan dasar , yaitu munculnya pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dengan nama Sekolah Dasar Inklusi. Landasan filosofis utama manajemen pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Depdiknas, 2003: 9).

Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertical maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebhinekaan vertical ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sedangkan kebhinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, budaya, bahasa, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. Karena berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, misi, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan berkebakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu sebaliknya di dalam individu. Berbakat pastilah terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa hal di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan penyesuaian diri siswa, studi kasus pada siswa program inklusi SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penyesuaian diri siswa terhadap program inklusi di SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana faktor pendukung penyesuaian diri siswa terhadap program inklusi di SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana faktor penghambat penyesuaian diri siswa terhadap program inklusi di SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran penyesuaian diri siswa terhadap program inklusi di SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung penyesuaian diri siswa terhadap program inklusi di SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat penyesuaian diri siswa terhadap program inklusi di SDN 15 Kotu Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari rencana penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah untuk memperkaya kajian ilmu mengenai penyesuaian diri siswa, program inklusi pada manajemen sekolah.
2. Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Instansi terkait dalam hal ini adalah Sekolah dalam hubungannya dengan program inklusi.